

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana, 2010.
- *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta : Chandra Pratama, 1996.
- Arens & Loebbecke, *Auditing, Pendekatan Terpadu*, Adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, Jakarta : Salemba Empat, 2003.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1994.
- _____, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Bandung : Bina Cipta, 1982.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta : Putra A. Bardin, 1996.
- Atmaja, Arifin P Soeria, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik Dan Praktik*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.

- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dari Segi Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2006.
- Djumhana, Muhammad, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya, 1996.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Kansil, C.S.T dan Christine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Cetakan I (Alumni AHM-PTHM), 1982.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Bina Cipta, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2002.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 2002.
- Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Poernomo, Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Bandung : Sumur, 1992
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung : Mandar Maju, 2001.
- _____, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2002.

- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994.
- Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradya Paramita, 1987.
- Subekti, dan Tjiptrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Paramita, 1980.

B. Majalah/Jurnal

- Bank, Asian Development (ADB), "Good Governance And Anticorruption : The Road Forward For Indonesia", Paper, Presented at eight meeting of the Consultative group on Indonesia, 27-28 July 1999, Paris, France.
- Nasution, Bismar, *Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato diucapkan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam ilmu hukum ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di hadapan rapat senat terbuka Universitas Sumatera Utara di gelanggang mahasiswa, Sabtu 17 April 2004.
- Terampil, Diklat Pembentukan Auditor, *Dasar-Dasar Auditing*, "Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan", Ciawi, 2005.
- Bahan Kuliah, *Filsafat Hukum*, Dihimpun oleh Irwansyah.
- BPKP Sulsel, Lakip Tahun 2010/2011.
- BPKP Sulsel, Lakip Tahun 2011/2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Republik Indonesia, Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, Np.Pol. B/2718/IX/2007, Nomor KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Non Budgeter.
- Republik Indonesia, Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana.
- Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

D. Internet

Y. Sri Susilo, "Mampukah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Menjadi Salah Satu Pillars Of Integrity", (http://www.transparansi.or.id/artikel/artikel_pk/artikel_02.html., diakses tanggal 7 Januari 2013).

BPKP Berwenang Tentukan Kerugian Negara, (<http://www.jpip.or.id/artikelview-89-bpkp-berwenang-tentukan-kerugian-negara.html>, diakses tanggal 23 Juli 2013).